



Inisiasi Pengorganisasian dan Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Andy Ilman Hakim ✉, Juwita Hayuning Prastiwi, Wimmy Haliim

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

andyilmanhakim@ub.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v9i3.6065> |

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering menghadapi tantangan dan hambatan yang kompleks dengan berbagai sentimen negatif. Mengingat patriarki, budaya lokal dan struktur politik yang diskriminatif terhadap perempuan masih banyak terjadi di titik-titik sektor strategis, baik wilayah domestik maupun publik. Bersama mitra kerjasama yaitu Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK), program pengabdian kepada masyarakat ini memfasilitasi perempuan untuk berdaya, dengan melakukan inisiasi pengorganisasian dan mendorong program kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Urgensi pemilihan sasaran isu yang menjadi fokus kegiatan mempertimbangkan upaya penanganan dan pencegahan situasi atas permasalahan perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan. Pemberdayaan perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan bantuan yang bersifat jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam keluarga, masyarakat, dan sistem negara. Dengan berorganisasi, potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat sehingga tidak lagi diabaikan. Penguatan kepemimpinan perempuan juga terus didorong sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik publik maupun privat. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan diharapkan menghasilkan perubahan yang dimulai dari diri perempuan tersebut, baik membangun kesadaran mengenai konsep diri yang kuat dan mandiri, serta memiliki potensi dan kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang lebih tinggi, munculnya kesadaran dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah perempuan.

Kata Kunci: Organisasi, Kepemimpinan, Pemberdayaan perempuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Memahami isu-isu perempuan dalam beberapa dekade ini menjadi fokus berbagai studi tentang perempuan. Mengingat diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di titik-titik sektor strategis, baik wilayah domestik maupun publik (Prastiwi *et al.*, 2024; Pradipta, 2017; Sohn 2015). Upaya penanganan dan pencegahan situasi atas permasalahan perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan. Beberapa studi tentang kepemimpinan perempuan menempatkan urgensi atas akses terhadap kemampuan dan hak kepemimpinan kaum perempuan. Pada prinsipnya, potensi perempuan dalam aspek keagamaan, kemampuan individu, sosial, dan budaya sebenarnya sama dengan potensi laki-laki. Studi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam potensi dasar antara keduanya (Habibah, 2015). Meskipun realitas sosial menunjukkan negasi atas prinsip tersebut.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kecenderungan mereka menempati posisi terbelakang disebabkan oleh beberapa faktor Tjokroaminoto (Hamka, 2013). Pertama, ada pemisahan peran maskulin/feminin yang dianggap sebagai hasil dari determinasi biologis, yang sering mengakibatkan marginalisasi perempuan. Kedua, terdapat pemisahan antara peran publik dan domestik yang berasal dari keyakinan bahwa "peran perempuan adalah di rumah," yang pada akhirnya mempertahankan pembagian antara fungsi produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, ada konsep "beban kerja ganda" yang menegaskan bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, sehingga menghambat pengaktualisasian potensi perempuan secara penuh. Keempat, adanya subordinasi dan peran marginal perempuan yang telah menjadi bagian dari pandangan bahwa peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat adalah sekunder. Secara empirik, temuan di kota Malang menunjukkan keadaan sosial yang menempatkan peran perempuan sebagai istri yang lazim disebut sebagai "*konco wingking*" atau teman di belakang (Subekti *et al.*, 2020). Hal tersebut menandakan masih terlihat persepsi posisi seorang perempuan berada di belakang laki-laki yang menjadi suaminya. Seolah menunjukkan mitos ketidakmampuan perempuan.

Diskusi tentang kepemimpinan perempuan juga menimbulkan perdebatan di antara beberapa kalangan, apalagi berkaitan dengan posisi sentral memimpin negara. Perbincangan tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik jauh lebih kompleks daripada diskusi tentang kepemimpinan perempuan di dalam rumah tangga. Menurut Umar (2001), perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan keduanya dari segi derajat sosialnya. Kepemimpinan perempuan sering kali dianggap sebagai usaha yang kurang didukung oleh penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan berbagai sentimen negatif. Ada yang menentang kepemimpinan perempuan di lingkup publik, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis, yang melarang partisipasi aktif kaum perempuan dalam politik (Zakaria, 2013).

Dilihat dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, tantangan sosiologis dan budaya seputar kepemimpinan perempuan sudah tidak relevan lagi. Upaya berkelanjutan menuju kesetaraan gender dan gerakan feminis global telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi kehidupan sosial kontemporer (Hartono, 2021). Ini adalah sebuah fenomena yang tak dapat disangkal bahwa saat ini perempuan telah mengisi berbagai posisi kunci di masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil (Fakih, 1996). Poin utama pada konteks ini, bahwa perempuan juga memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat secara luas dalam pembangunan.

Berdasarkan paparan di atas, tim pengabdian kepada masyarakat telah merumuskan kegiatan guna mendukung upaya penguatan kepemimpinan perempuan. Tim penyelenggara program pengabdian kepada masyarakat diantaranya Andy Ilman Hakim dengan fokus bidang kajian Politik Lokal, Juwita Hayyuning Prastiwi yang memiliki bidang kajian Gender dan Politik, serta Wimmy Haliim dengan fokus kajian kebijakan. Untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim telah bekerjasama dengan Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK). Sekilas tentang KPuK yang merupakan lembaga swadaya masyarakat di Malang. Didalamnya tergabung berbagai organisasi perempuan dan individu dengan beragam latar belakang yang bermuara pada tujuan melakukan perubahan pada kondisi dan posisi perempuan. KPuK digerakkan dengan modal kerelawanan (*volunteerism*), menggali potensi dan sumberdaya dari kalangan senior dan kalangan muda yang memiliki perhatian pada isu perempuan, keadilan gender dan inklusi sosial terutama di wilayah Malang Raya.

Pemilihan sasaran isu yang menjadi fokus di atas menjadi penting, mengingat beberapa data menunjukkan adanya kesenjangan-kesenjangan gender di berbagai bidang. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia, wilayah Malang Raya pada tahun 2020, menunjukkan kabupaten Malang memiliki indeks terendah sebesar 70,36. Sedangkan untuk dua wilayah lain yaitu Kota Malang dan Kota Batu berturut-turut memperoleh capaian 81,45 dan 75,90. Pada tahun 2020 kemiskinan di Kabupaten Malang adalah sebanyak 65 560 jiwa dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,37 (BPS, 2020). Sebagai bagian dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas yang komprehensif yang berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dan dukungan advokasi, memperkuat keberadaan Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) dan KPuK adalah bentuk dukungan positif. Setidaknya kegiatan Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) Malang menjadi bagian dalam upaya tersebut. Sebab, persoalan kualitas pembangunan juga terkait dengan seberapa dalam perempuan dilibatkan di dalam proses-proses tersebut. Keterlibatan dan penguatan kepemimpinan perempuan ini penting mengingat perempuan memiliki kepentingan khusus akibat situasi khas yang dialami perempuan sebagai satu kelompok. Di antara situasi-situasi tersebut seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, termasuk aktivitas perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan reproduksi dan komunitas lainnya.

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pembahasan *gender mainstreaming* yang dibatasi pada aspek perempuan. Secara umum, upaya pemenuhan *gender mainstreaming* memang mengenal dua jenis kebutuhan gender, yakni kebutuhan praktis gender seperti perbaikan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pemberian pelatihan, pemberian modal usaha, dan sebagainya. Dan kebutuhan strategis gender, dimana upaya pemenuhan kebutuhannya dapat ditempuh diantaranya melalui partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan serta perubahan peraturan-peraturan hukum yang selama ini meminggirkan perempuan. Pada poin-poin inilah sasaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan. Urgensi kegiatan-kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan diharapkan menghasilkan perubahan yang dimulai dari diri perempuan tersebut, baik membangun kesadaran mengenai konsep diri yang kuat dan mandiri, serta memiliki potensi dan kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang lebih tinggi, munculnya kesadaran dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah perempuan.

2. Metode

Terdapat beberapa metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Secara umum hal penting yang menjadi capaian target meliputi pemetaan unsur kebutuhan dan penunjang penguatan kepemimpinan perempuan, serta terselenggaranya program penguatan melalui pelatihan di RKP Griya Baca Malang. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat perempuan yang melibatkan KPuK, tim pengabdian, serta masyarakat perempuan di Malang.



Gambar 1. Proses Kegiatan Program Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Gambar 1 menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat guna mencapai tujuan. Pihak yang terlibat meliputi tim pengabdian masyarakat, KPuK, serta kelompok perempuan yang tergabung dalam RKP Griya Baca Malang. Metode pelaksanaan program penguatan kepemimpinan perempuan dilakukan melalui dua tahap, pertama melalui metode pengorganisasian kelompok perempuan sasaran, serta pelatihan.

Metode pengorganisasian ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama (KPuK) untuk membentuk RKP, salah satunya RKP Griya Baca Malang. Mitra KPuK berperan dalam mengidentifikasi lokasi dan kelompok perempuan sasaran. Pengorganisasian bertujuan untuk memperkuat kemampuan perempuan dalam memahami potensi kepemimpinan mereka sendiri, mengidentifikasi pihak lain yang dapat berkolaborasi, dan menemukan pendekatan yang sesuai dengan konteks, misalnya melalui forum pertemuan, pelatihan, serta pemberdayaan. Dalam prosesnya, pengorganisasian tersebut dilakukan dengan tahapan berikut: (1) pembentukan dan penentuan tujuan rkp yang meliputi proses mengikutsertakan perempuan-perempuan dalam pembentukan rkp griya baca malang; (2) penyusunan aturan organisasi; (3) identifikasi permasalahan; (4) identifikasi potensi sumber daya manusia (baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat) serta potensi jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi dan anggotanya; (5) rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

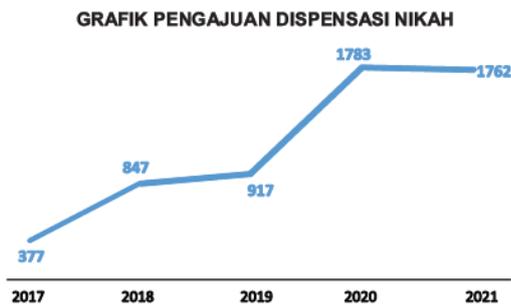
Setelah proses pengorganisasian melalui RKP terbentuk, tahapan yang dapat dilakukan berikutnya adalah penguatan kepemimpinan perempuan melalui program/kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini berfokus pada topik Politik dan Perempuan dengan beberapa indikator yang menjadi pedoman dan fokus utama meliputi: (1) kemampuan perempuan mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya; (2) kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya sendiri; (3) kemampuan perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi; (4) membangun kesadaran dan pemikiran kritis perempuan. Indikator ini mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Inisiasi Pengorganisasian Perempuan

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah lembaga swadaya masyarakat yaitu Koalisi Perempuan untuk Kemanusiaan (KPuK). Sebagai organisasi dengan basis perempuan, KPuK terus melakukan penyempurnaan kelembagaan dan arah gerakan. Membangun Rumah Kepemimpinan Perempuan adalah salah satu program yang di advokasikan sebagai suatu model untuk direplikasi beragam pihak, terutama pemerintah daerah.

Upaya untuk menghasilkan perempuan kader kepemimpinan yang mampu menggerakkan aksi perubahan terus didorong di tengah permasalahan posisi dan kondisi perempuan di Malang. Permasalahan yang tengah dihadapi mitra saat ini adalah persoalan perkawinan dini, terutama bagi perempuan yang belum mendapatkan perhatian penanganan segera. Data pengajuan dispensasi nikah dapat ditunjukkan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Data KPUK tentang Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan catatan KPUK pada tahun 2022 rendahnya perhatian tersebut mulai dari keluarga yang mengabaikan hak perlindungan dan pendidikan anak, masyarakat yang cenderung permisif dan pembuatan kebijakan yang tidak menempatkannya sebagai masalah mendesak dan serius.

Data formal yang tersaji memungkinkan jauh lebih banyak, mengingat fakta di lapangan berpotensi menguak fakta yang jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan penggalian data sangat terbatas cakupannya, atau terdapat kasus yang tidak dilaporkan, bahkan sengaja disembunyikan dengan beragam alasan. Umumnya, persoalan tersebut terlihat dari bagaimana akses kontrol atas sumberdaya dan peran dalam pembangunan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Seringkali perempuan hanya ditempatkan dalam posisi yang tidak strategis, baik dalam organisasi, pekerjaan, maupun partai politik ([Rahim, 2016](#)). Permasalahan ini semakin memosisikan perempuan sebagai kelompok paling rentan di masyarakat. Mengingat, secara ekonomi perempuan lebih miskin karena biasanya tidak menguasai sumber daya ekonomi yang berarti. Secara sosial, perempuan biasanya mengambil peran ibu rumah tangga dan sibuk melakukan kegiatan domestik rumah. Secara politik, perempuan biasanya diposisikan bukan sebagai pengambil keputusan.

Tantangan seperti stereotip gender ([Pahlevi et al., 2023](#)) dan beban kerja ganda ([Huda, 2021](#)) tetap menjadi kendala utama. Sebagaimana hasil identifikasi tim pengabdian kepada masyarakat, setidaknya terdapat dua permasalahan utama yang dialami kelompok sasaran, yaitu permasalahan yang berasal dari urusan domestik sebab perannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan permasalahan yang berasal dari dalam dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Mayoritas peserta pengabdian umumnya mengalami permasalahan pada ruang domestik, baik posisinya sebagai ibu rumah tangga, maupun perempuan pencari nafkah. Perempuan cenderung menghadapi permasalahan mengenai biaya sekolah anak, lingkungan pergaulan anak, suami, biaya kesehatan, dan ekonomi sehingga pada situasi tertentu mereka harus menghadapi beban kerja ganda. Dampak yang sering dialami adalah mengenai kesehatan mental, terutama stres sebagai efek beban kerja ganda. Selain itu adapun permasalahan mengenai kesehatan fisik, yaitu kelelahan dan menstruasi yang tidak lancar.

Diperlukan dukungan melalui program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, seminar, dan kebijakan yang ramah gender, serta pengorganisasian komunitas perempuan agar mereka dapat membangun jaringan dan organisasi yang mendukung kemajuan mereka. Pemberdayaan perempuan mengacu pada proses partisipasi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik (Firmansyah *et al.*, 2021). Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pengorganisasian kelompok perempuan. Ini dapat mendorong dan memperluas jejaring kelompok perempuan di Malang. Upaya ini setidaknya dapat menunjang kelompok perempuan dalam memahami potensi kepemimpinan mereka sendiri, mengidentifikasi pihak lain yang dapat berkolaborasi, dan menemukan pendekatan yang sesuai dengan konteks, misalnya melalui forum pertemuan, pelatihan, serta pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan bantuan yang bersifat jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam keluarga, masyarakat, dan sistem negara. Melalui wadah organisasi tersebut, perempuan dapat didorong untuk mentransformasikan peran gendernya, baik dengan penguatan kapasitas individu dan akses untuk berperan aktif dalam forum di berbagai tingkatan. Hal tersebut dapat memperkuat posisi perempuan termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang berbasis *power within* yaitu kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif atau yang dikenal dengan kekuasaan sosial (*social power*) (Namirah *et al.*, 2023). Dengan demikian, potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat sehingga tidak lagi diabaikan. KPuK selaku mitra kerjasama, menginisiasi pengorganisasian melalui terbentuknya RKP Griya Baca kota Malang. Kegiatan dapat disajikan pada Gambar 3.

Inisiasi pengorganisasian ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama (KPuK) untuk membentuk Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP), salah satunya RKP Griya Baca Malang. Mitra KPuK berperan dalam mengidentifikasi lokasi dan kelompok perempuan sasaran. Dalam prosesnya, pengorganisasian tersebut di inisiasi dengan merangkul komunitas Griya Baca di kota Malang dengan mengikutsertakan perempuan dan Ibu Rumah Tangga dalam membentuk RKP. Proses pengorganisasian ini bertahap sehingga penyamaan persepsi atas tujuan organisasi ditentukan bersama. Setelah proses pengorganisasian dilakukan, penyusunan aturan organisasi, identifikasi masalah dan potensi sumber daya, serta rencana kegiatan ke depan turut dilakukan.



Gambar 3. Pengorganisasian Perempuan Melalui RKP Oleh KPuK

Fase ini sangat menunjang kelompok perempuan di komunitas tersebut semakin berdaya dengan adanya wadah untuk menggali potensi kolaborasi, memahami potensi kepemimpinan mereka sendiri, serta penguatan jejaring antar perempuan.

3.2. Penguatan Kepemimpinan Perempuan melalui Rumah Kepemimpinan Perempuan

Setelah proses pengorganisasian melalui RKP terbentuk, tahapan yang dapat dilakukan berikutnya adalah penguatan kepemimpinan perempuan melalui program/kegiatan kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini berfokus pada topik Politik dan Perempuan. Beberapa indikator yang menjadi pedoman dan fokus utama meliputi: (1) kemampuan perempuan mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya; (2) kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya sendiri; (3) kemampuan perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi; (4) membangun kesadaran dan pemikiran kritis perempuan. Indikator ini mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan kepemimpinan perempuan dalam organisasi dan institusi pemerintahan secara positif, menyoroti kemampuan perempuan mempertahankan karakter feminin, seperti sikap mengayomi bawahan. Namun realitas kepemimpinan perempuan juga menghadapi fenomena yang kompleks. Studi mengenai kepemimpinan perempuan banyak difokuskan pada hambatan multidimensi yang dihadapi oleh perempuan, misalnya pada aspek sosio kultural, budaya patriarki, dan aspek struktural. Tanpa kesadaran kritis dan posisi strategis, pemimpin perempuan akan sulit menghasilkan kebijakan yang berperspektif gender. Selain itu, institusi parlemen dan partai politik yang bersifat patriarkis seringkali mempengaruhi pemimpin perempuan untuk menerapkan kebijakan dengan karakter maskulin (Famelasari *et al.*, 2021).

Upaya penguatan kepemimpinan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik publik maupun privat. Program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial-budaya yang sering membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat. Kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik yang unik, seperti kemampuan multitasking, pendekatan kolaboratif, dan empati (Bahri *et al.*, 2022), yang memungkinkan mereka untuk menciptakan organisasi yang lebih inklusif, sehat, dan inovatif. Selain itu, perempuan sering menunjukkan keterampilan membangun hubungan yang lebih baik (Prastio *et al.*, 2021), baik di lingkungan profesional maupun sosial. Riset juga menunjukkan bahwa representasi perempuan di sektor kepemimpinan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi (Halilah, 2012).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfasilitasi proses penguatan kepemimpinan perempuan melalui program kepemimpinan perempuan di RKP Griya Baca Malang (Gambar 4). Salah satu pokok perhatian dalam forum dan program tersebut adalah membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kelompok harus menjadi nilai bersama dalam setiap perempuan sehingga organisasi akan memiliki nilai, pandangan dan upaya-upaya bersama yang lebih kuat untuk merebut pengakuan dan ruang-ruang publik. Hal ini termasuk menyuarakan kepentingan perempuan sebagai bagian penanganan persoalan perempuan lainnya. Proses ini juga menyoroti penguatan pemahaman pentingnya proses edukasi, advokasi, komunikasi dan konsolidasi penguatan kelompok perempuan. Proses ini mendiskusikan tentang urgensi dan upaya perlindungan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Selama ini, perempuan telah terkekang oleh stigma atas nilai yang menempatkannya harus menerima keadaan dan posisi di belakang laki-laki (Khurunin, 2020), hanya sebagai pendukung dan dianggap tidak pantas untuk memimpin.



Gambar 4. FGD Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Akibatnya, kepercayaan diri perempuan tergerus, mereka cenderung bergantung pada orang lain (terutama laki-laki), dan enggan mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Padahal terdapat ruang dan peluang yang sama dan setara bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah publik (Yusuf, 2015).

Perempuan jarang diajarkan untuk bersuara, dan seringkali aspirasinya diwakilkan oleh pihak lain, terutama laki-laki. Mereka kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan lingkaran sosial mereka terbatas dalam hal mobilitas dan ruang lingkup pembicaraan. Banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari desa atau kecamatan mereka guna mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Ketika terlibat dalam organisasi, fokus perempuan cenderung terbatas pada urusan rumah tangga yang dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman perempuan terhadap isu-isu besar di sekitarnya.

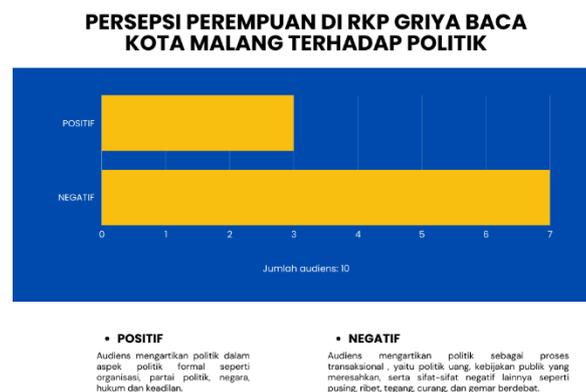
Membangun kepemimpinan perempuan adalah proses kesadaran jangka panjang bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki keinginan, impian, kebutuhan, dan aspirasi. Pada tingkat individu, pengembangan kepemimpinan berarti meningkatkan keyakinan akan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mengaktifkannya. Perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan dan harus dihormati. Kepemimpinan perempuan memiliki keunggulan karena dianggap lebih mudah peka, sikap lembut, intuitif, dan sistematis (Fitriana *et al.*, 2021). Tidak jarang, kepemimpinan perempuan dianggap dapat menggabungkan pendekatan informal yang membuatnya lebih efektif dalam merumuskan tujuan yang lebih konkret. Banyak situasi yang membuat perempuan merasa kurang mampu, kurang percaya diri, dan cenderung bergantung pada orang lain. Sebagai contoh, perempuan sebagai istri sering kali bergantung pada suami atau pria lainnya. Peran dan posisi perempuan sering dianggap remeh dan tidak bermakna dalam banyak kasus. Pandangan ini tidak hanya berasal dari masyarakat secara umum yang masih menempatkan perempuan sebagai anggota kelas kedua, tetapi juga seringkali berasal dari dalam diri perempuan sendiri. Perempuan dianggap dan mungkin merasa kurang kuat, mudah menyerah, dan tidak perlu memiliki ambisi untuk mencapai hal-hal yang strategis baik bagi dirinya maupun masyarakatnya.

Struktur dan budaya dalam masyarakat seringkali menempatkan perempuan pada situasi yang membuat mereka terlihat tidak mampu dan kurang berharga (Maulidia, 2021). Sebagai contoh, dalam masyarakat, aspirasi perempuan seringkali kurang didengar atau diwakilkan oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan seringkali kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka sendiri. Pada kenyataannya, perempuan adalah individu yang mandiri, memiliki kebutuhan, dan memiliki aspirasi sendiri, sama seperti halnya dengan laki-laki (Hilmiati *et al.*, 2022).

Perempuan pemimpin yang akan memiliki pandangan jauh ke depan mampu mengidentifikasi kondisi serta merumuskan gagasan menjadi strategi baru, serta mengkomunikasikan potensi-potensi untuk menginspirasi orang lain. Perempuan dengan visi mampu memproyeksikan pencapaian yang diinginkan di masa depan dan memiliki pemahaman akan cara mencapainya. Mereka juga mempertimbangkan segala aspek kehidupan mereka, termasuk mengelola risiko dan menghindari kegagalan. Salah satu ciri perempuan visioner adalah optimis dan memancarkan aura positif, yang membuat mereka tampil percaya diri dan bangga dengan pilihan hidup mereka. Bagi perempuan visioner, pencapaian pribadi dan manfaat bagi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan kerja mereka. Dengan meningkatkan akses perempuan ke posisi kepemimpinan, diharapkan dapat terjadi transformasi sosial yang mendorong kesetaraan gender dan pembangunan yang lebih adil.

3.3. Respon Peserta Atas Urgensi Partisipasi Perempuan dalam Proses Politik

Pada program ini kelompok perempuan didorong untuk memahami urgensi keterlibatan perempuan dalam proses-proses politik, misalnya turut serta terlibat dalam organisasi, mengemukakan pendapat dan tuntutan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan *pre-test* tentang persepsi awal peserta terhadap praktik politik di kehidupan sehari-hari. Mayoritas dari peserta mengidentifikasi praktik politik dalam kehidupan sehari-hari dalam konotasi negatif, seperti praktik politik uang, kebijakan publik yang meresahkan, dan sifat-sifat negatif seperti tegang, pusing, ribet, curang, dan berdebat karena berbeda pendapat. Sedangkan beberapa peserta melihat praktik politik dalam konotasi positif seperti adanya pemerintahan dan hukum yang penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan keteraturan masyarakat. Data persepsi tersebut dapat disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Persepsi Perempuan Terhadap Praktik Politik

Peserta kegiatan memaparkan pengalaman keterlibatannya dalam Pemilu yang perannya terbatas sebagai pemilih (*voters*). Pada posisi ini mereka seringkali hanya dijadikan objek untuk mendulang suara tanpa diperhatikan kedudukannya sebagai perempuan yang memiliki kebutuhan atas situasi khusus. Artinya seringkali mereka diabaikan ketika masa pemilihan telah selesai tanpa ada tindak lanjut kehadiran suatu kebijakan yang menunjang mereka untuk berdaya. Pada fase ini, peserta melihat urgensi partisipasi politik bagi perempuan untuk memperkuat jejaring mereka dan melakukan kolaborasi. Inisiasi pengorganisasian perempuan di RKP Griya Baca Malang adalah salah satu wadah bagi mereka untuk turut serta dalam partisipasi.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang memiliki korelasi dengan kepentingan masyarakat artinya bergabung di dalam forum publik atau kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya informal merupakan bagian dari partisipasi politik. Wadah untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi politik dibedakan menjadi dua yakni, organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dari hasil diskusi, peserta dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan wadah dan saluran informasi yang dapat mereka akses baik sifatnya informal maupun formal. Misalnya organisasi perempuan, forum PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), forum kultural pengajian, kepanitiaan kegiatan desa/kecamatan, serta fasilitas sekolah kejar paket yang disediakan pemerintah.

Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat, perempuan di Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) Griya Baca kota Malang mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik. Pertama, indikator dalam kemampuan perempuan dalam mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini terlihat dalam kemampuan peserta dalam mengidentifikasi hak, peran, dan kesempatan dalam mendapatkan akses politik. Perempuan mampu mengidentifikasikan hak nya dalam mendapatkan pendidikan politik maupun identifikasi peran dan akses dalam politik dapat dilihat melalui jawaban akan pertanyaan hal yang menarik dari diskusi adalah dapat bertukar pendapat akan masalah perempuan dan politik serta bertukar pengalaman khususnya dalam membedakan hal yang privat dan publik; (2) kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan perempuan yang mulai memahami hak, peran serta kesempatan akses dalam politik sehingga perempuan mampu memutuskan akan dirinya sendiri; (3) kemampuan perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi.

Perempuan dapat memahami arti politik dan mulai memahami partisipasi politik dapat dilakukan tidak terbatas hanya dengan melalui pencalonan dalam pemilihan umum. Kemampuan perempuan meningkat dengan mengetahui bahwa melalui keputusan dalam diskusi dapat dikatakan sebagai partisipasi politik di forum lembaga tertentu; (4) membangun kesadaran dan pemikiran kritis perempuan. Dalam Indikator ini mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan. Perempuan sudah mampu berpikir kritis akan kebutuhan wanita dan mengidentifikasikan aspirasi bagi politisi seperti kesehatan terkait kewanitaan, tumbuh kembang anak selama kandungan, dan yang paling utama adalah mengidentifikasikan tantangan akan perempuan akan perkembangan dan kebutuhan wanita dalam hidup yang terbatas akan kebutuhan keluarga dan menempatkan keluarga diatas segalanya dengan memomorduakan diri sendiri, serta mengidentifikasikan masalah perempuan yang seharusnya merupakan masalah publik.

Perempuan mandiri akan memiliki beberapa unsur sikap seperti memegang kendali diri sendiri. Artinya mereka berarti memahami kemampuan yang dimiliki dan menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan dan aspirasi, sembari menyadari keterbatasan yang ada. Keterbatasan merupakan hal yang umum dialami oleh semua orang, termasuk perempuan, namun yang penting adalah bagaimana usaha untuk mengatasinya. Selain itu, perempuan tidak bergantung pada pihak lain, berarti bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang keinginan, kebutuhan, dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya (Junaenah, 2014). Perempuan memiliki kemandirian untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan dalam hidup mereka. Termasuk juga berani menghadapi potensi kekerasan fisik dan pelecehan seksual, adalah kemampuan untuk menghadapi situasi di mana perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan, baik dari individu di sekitarnya maupun dari masyarakat yang merendahkan peran mereka (Nurtjahyo, 2020).

Perempuan yang mandiri memiliki keberanian untuk menanggapi situasi tersebut dengan berbagai strategi yang dianggap sesuai. Terakhir, sikap lebih jelas dengan prioritas diri, yaitu perempuan yang mandiri mengutamakan aspirasinya sendiri, bukan terpengaruh oleh orang lain yang mungkin tidak selalu sesuai. Mereka memahami pengalaman hidup mereka sendiri dengan baik dan paling mengerti hal-hal yang paling penting dalam hidup mereka.

4. Kesimpulan

Perempuan sering menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan berbagai sentimen negatif. Upaya penanganan dan pencegahan situasi atas permasalahan perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan. Beberapa studi tentang kepemimpinan perempuan menempatkan urgensi atas akses terhadap kemampuan dan hak kepemimpinan kaum perempuan. Kegiatan pengabdian ini memfasilitasi perempuan untuk berdaya, dengan melakukan inisiasi pengorganisasian dan mendorong program kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Pemberdayaan perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan bantuan yang bersifat jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan.

Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, dan sistem negara. Dengan berorganisasi, potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat sehingga tidak lagi diabaikan. Penguatan kepemimpinan perempuan juga terus didorong sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik publik maupun privat. Program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial-budaya yang sering membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat. Salah satu pokok perhatian dalam forum dan program tersebut adalah membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kelompok harus menjadi nilai bersama dalam setiap perempuan sehingga organisasi akan memiliki nilai, pandangan dan upaya-upaya bersama yang lebih kuat untuk merebut pengakuan dan ruang-ruang publik. Hal ini termasuk menyuarakan kepentingan perempuan sebagai bagian penanganan persoalan perempuan lainnya. Dengan demikian, kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan diharapkan menghasilkan perubahan yang dimulai dari diri perempuan tersebut, baik membangun kesadaran mengenai konsep diri yang kuat dan mandiri, serta memiliki potensi dan kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang lebih tinggi, munculnya kesadaran dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah perempuan.

Acknowledgement

Terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, khususnya kepada KPuK dan RKP Griya Baca Malang. Serta, Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) yang telah memberikan kesempatan untuk tim melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Skema Program Hibah Pengabdian Masyarakat secara Kelompok oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Bahri, M.H., Surya, I. and Darma, M. 2022, Pengaruh Kinerja Perempuan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 10(3), 532-545.
- BPS Kabupaten Malang. (2020). *Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Malang, 2012 - 2019*.
- BPS Kabupaten Malang. (2020). *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Malang, 2012 - 2019*.
- BPS Kabupaten Malang. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia/IPM Kabupaten Malang 2010 - 2018*.
- Fakih, M. (1996). *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Famelasari, R & Prastiwi, J. H. 2021. Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 126-147.
- Firmansyah, C. A., & Sihalo, E. D. (2021). The effects of women empowerment on indonesia's regional economic growth. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 12-21.
- Fitriana, A., & Cenni, C. 2021. Perempuan dan kepemimpinan. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 1, Maret 2021, pp. 247-256.
- Habibah. (2015). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Sosioreligius*. 1(1) 1.
- Halilah, H. 2012, Kepemimpinan Wanita dalam Manajemen Kependidikan. *Jurnal Manajemen of Edukasi Fak. Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin*, 1(1), 1-9.
- Hamka, H. (2013). Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern. *Jurnal "Al-Qalam"*, 19(1), 107-116.
- Hartono, R. 2021. Kepemimpinan perempuan di era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*1 (1), 82-99.
- Hilmiati, Ernita Dewi, & Zuherni. (2022). Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. *Jurnal Pemikiran Islam* 2 (1), 117-135.
- Huda, K. (2021). Perempuan Kapuk dalam Ekspektasi Budaya Patriarki (Sebuah Analisis Beban Ganda Gender). *Kafa'ah Journal*, 11 (2), 185-198.
- Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 222-232.
- Khurun'in, I., & Subekti, T. (2020). Women Environmental Cadres: An Assessment of Ecofeminism in Women's Environmental Movement (Case Study in Activities of "Fostering Family Welfare" or PKK in Malang, 2018). In *Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Governance, ICONEG*, 25-26 October 2019, Makassar, South Sulawesi, Indonesia.
- Maulidia, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminisme. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 1 (1), 71 - 79.
- Namirah, S. A., & Ruwaida, I. (2023). Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil. *Jurnal Perempuan*, 28 (2), 101-115.
- Nurtjahyo, L. I. 2020. Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 (1), 106-123.

- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3 (2), 259-268.
- Pradipta, L. (2017). Dealing With Discrimination: Women Labor and Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 7(1), 19-28. <https://doi.org/10.14203/jissh.v7i1.70>
- Prastio, L. O. et al. 2021. Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics*, 3 (2), 103-114.
- Prastiwi, J. H., & Hakim, A. I. (2024). Women's Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 6 (2), pp. 207-234.
- Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9 (2), 268-295.
- Sohn, K. (2015). Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 95-121. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569>
- Subekti, T., & Khurun'in, I. 2020. Perempuan sebagai Kader Lingkungan pada Aktivitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Malang. *Journal of Politics and Policy*, 2 (2), 173-184.
- Tim KPUK. (2022). *Rumah Kepemimpinan Perempuan: Menyusun Langkah Pencegahan Pernikahan Dini*. Malang: KPUK.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- Yusuf, M. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif kearifan lokal: pemikiran ulama bugis dan budaya bugis. *Journal of Social Science and Religion*, 22 (1), 69-81.
- Zakaria, S. 2013. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Khazanah*, 1 (2).